

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Badruzaman, Mariam Darus, Sistem Hukum Perdata Nasional, Makalah dalam kursus hukum perikatan., kerjasama ilmu hukum belanda dengan indonesia proyek hukum perdata, (jakarta, 1978).

Fuady, munir, jaminan fidusia. , (bandung: citra aditnya bakti, 2000),

-----, hukum pailit dalam teori dan praktek, , (bandung: citra aditya bakti, 2002).

Man S. Sastrawidjaja. Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang, (Bandung: PT , Alumni, 2006) .

Masjchoen sofwan, sri soedewi, himpunan karya tentang hukum jaminan, (yogyakarta: liberty, 1980).

Mertokusumo sudikno, huum acara pidana di indonesia, liberty. (jogjakarta. 2003).

Muhammad, abdulkdir. Hukum dan penelitian hukum. (bandung: citra aditya bakti, 2004).

Nainggolan, bernard. Perlindungan hukum seimbang debitor, kreditor dan pihak-pihak berkepentingan dalam kepailitan. (bandung 2011).

Satrio, J., cessie, subrogatie, novatie, kompensatie dan pecampuran hutang (bandung: alumni, 1999)

-----, hukum jaminan hak jaminan kebendaan fidusia, cet 1. (bandung: citra aditya bakti, 2002),

Sjahdeini, sutan remy. “hak jaminan dan kepailitan”, makalah pembeding dalam seminar sosialisasi undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. (jakarta, 2000).

-----, hukum kepailitan, (jakarta: PT. Pustaka utama grafiti, 2002).

Soekarno, soerjono, pengantar penelitian hukum. (jakarta: universitas indonesia UI-Press, 1986).

Soemitro ronny hanitijo. Metode penelitian hukum dan jurimetri, (jakarta: ghalia indonesia, 1988), .

Subhan, M. Hadi. Hukum kepailitan (prinsip, norma, dan praktik di pengadilan), jakarta: putra grafika, 2008.

Sunarmi, Hukum Kepailitan, Edisi 2. (Jakarta: Penerbit Softmedia, 2010).

Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan Ed. 1. Cet.2 (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).

Widjaja, Gunawan Dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

BPHN, Seminar Hukum Jaminan Tahun 1978, Kesimpulan Kelompok A, Angka 5, (Bandung: Binacipta, 1981)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2014

Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, 1999.

Sekretariat negara RI. Undang-undang RI nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang. Jakarta 2004.

### **Website :**

Julita BR Segala.“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis terhadap Tindakan-Tindakan Dalam Periode Keadaan Diam (Standstill) Dalam Kepailitan”(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26372/4/Chapter%20I.pdf.)